

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif tahun 2001 merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2004). Otonomi daerah memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada tahun 2004, UU No.25 Tahun 1999 digantikan dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dan alokasi khusus, dan dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Menurut Amril *et al* (2015), dalam penelitiannya menyebutkan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah adalah transfer pemerintah pusat. Penggunaan pendapatan yang diterima oleh daerah sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah, dengan harapan pemerintah daerah dapat menggunakannya secara efektif dan efisien guna untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Transfer dari pemerintah

pusat merupakan dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang olehnya pemerintah daerah dilaporkan dalam perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dominannya peran transfer dana dari pemerintah pusat relative lebih besar terhadap pendapatan asli daerah, sebenarnya dalam membiayai belanja pemerintah daerah tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintah daerah terhadap aliran transfer dana itu sendiri. Secara internasional bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa ternyata tingginya ketergantungan pada transfer berhubungan negative dengan pemerintahannya. Dalam hal ini berarti pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menggunakan data yang digali dari masyarakat sendiri daripada dana yang diterima dari pemerintah pusat. Fakta di atas memperlihatkan bahwa perilaku fiskal pemerintah daerah dalam merespon transfer dari pemerintahan pusat menjadi determinan penting dalam menunjang efektivitas kebijakan transfer.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah ditambah dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan layanan publik. Anggaran pendapatan dan belanja daerah

juga dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Halim, 2007).

Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrument strategis dalam perekonomian (Christoper, 2009). Belanja daerah adalah pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2003). Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, dimana belanja daerah tersebut digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

Dalam membiayai belanja daerah diperlukan pendapatan daerah yang memadai. Dengan demikian kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2000) menyatakan bahwa “dari segi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan daerahnya masih belum signifikan. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal”.

Badan pendapatan daerah (Bapenda) Kota Palopo menargetkan penerimaan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp4.449.319.260,

dimana untuk tahun 2018 lalu, terealisasi sebesar Rp.3.439.275.684 atau 83,53 persen dari target awal Rp4.034.284.681. hal ini disampaikan kepala Bapenda Palopo, Abd Waris (24/11/2019).

Di Indonesia sendiri, beberapa penelitian tentang *flypaper effect* di berbagai daerah menghasilkan kesimpulan dan hasil yang berbeda-beda contohnya (Maimunah, 2006) pernah melakukan pengujian adanya *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera. Akan tetapi dari hasil penelitian tersebut tidak dapat untuk menyimpulkan wilayah diseluruh Indonesia, karena setiap kabupaten/kota memiliki kemampuan yang berbeda-beda.

Abdul Halim dan Sukriy Abdullah (2002) dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU periode t-1 terhadap belanja daerah periode-t. Maimunah (2006) menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap BD dan telah terjadi *flypaper effect* DAU terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Widodo (2007) menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi *flypaper effect* hanya pada perhitungan belanja daerah ditahun 2003, sedangkan ditahun 2001,2002,2004 dan 2005 tidak ditemukan adanya *flypaper effect*. Pramuka (2010) ternyata menyimpulkan tidak terjadinya *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di pulau Jawa namun ada pengaruh positif DAU dan PAD tahun berjalan maupun tahun sebelumnya terhadap belanja daerah. Kusumadewi dan Rahman (2007) mengindikasikan bahwa *flypaper effect* tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul “Pengaruh *Flypaper Effect* Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Palopo”.

1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan *flypaper effect* terhadap Belanja Daerah kota Palopo
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Daerah kota Palopo

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *flypaper effect* terhadap Belanja Daerah kota Palopo.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sesuatu yang diharapkan ketika sebuah penelitian sudah selesai. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam mengembangkan wawasan dibidang belanja daerah dalam pemerintahan

daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada.

2. Bagi Pemerintahan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintahan daerah untuk memanfaatkan dana transfer dari pemerintahan pusat dan pendapatan asli daerah secara proporsional dan disajikan secara transparan sehingga dapat terwujud *good governance*.

3. Bagi Pembaca dan Almamater

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja di pemerintahan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Flypaper Effect*

Flypaper Effect merupakan suatu fenomena pada suatu kondisi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/*grants* atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *uncontional grants* daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah.

Transfer tidak bersyarat ditentukan berdasarkan celah fisik daerah, yaitu kebutuhan pengeluaran daerah dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi keseluruhan dari pemerintah pusat. Intinya, transfer tidak bersyarat berfungsi menutupi anggaran kebutuhan yang tidak terpenuhi hanya dari pendapatan murni daerah tersebut. Data yang dipaparkan oleh banyak jurnal penelitian memaparkan bahwa *Flypaper Effect* terjadi di kebanyakan daerah di Indonesia. Dalam jurnal Akuntansi Multiparadigma yang diterbitkan oleh Nahdatul Ulama Jepara, fenomena ini dapat ditelaah dari peningkatan pemanfaatan DAU daripada PAD.

Diah dan Arif (2007) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku pemerintahan daerah dalam merespon transfer pemerintah pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerah sendiri. Ketika respon pemerintah daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerah sendiri maka disebut *flypaper effect*.

2.1.1 Penyebab *Flypaper Effect*

Penyebab *flypaper effect* yaitu adanya penyimpangan dalam teori bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa transfer pemerintah pusat memang meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi ternyata tidak menjadi substitut bagi pajak daerah, maka fenomena tersebut dikenal dengan *flypaper effect*. Menurut Sagbas dan Saruc (2008) menyatakan bahwa ada dua teori utama dari beberapa penelitian tentang sumber munculnya *flypaper effect* yang sering digunakan yaitu *Fiskal Illusion dan The Bureaucratic Model*. Teori *Fiskal Illusion* sebagai sumber *flypaper effect* mengemukakan bahwa *flypaper effect* terjadi dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan serta keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut.

2.1.2 Dampak *Flypaper Effect*

Dampak *flypaper effect* yaitu salah satunya akan meningkatkan lebih besarnya belanja pemerintah daerah dari pada penerimaan transfer itu sendiri dan juga lebih cenderung untuk menanti bantuan dari pemerintah pusat dibandingkan mengelola sumber daya daerah sendiri. Secara implisit terdapat beberapa implikasi dari terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota.

Menurut Waidi, 2009:35 (dalam Afirzawati, 2012) secara implisit akibat dari terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota yaitu seperti, menyebabkan akan tetap adanya celah fiskal (*fiscal gap*). Tujuan dari pemerintah pusat dalam memberikan DAU kepada pemerintah daerah yaitu untuk menutup celah fiskal yang terjadi karena kebutuhan daerah yang lebih besar dibandingkan dengan

potensi penerimaan daerah yang ada, maka dari itu jika terjadi *flypaper effect* artinya pencapaian pemberian dana transfer dianggap kurang optimal. Ini terlihat pada analisis perkembangan DAU dan belanja daerah.

Dampak *flypaper effect* selanjutnya yaitu menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD, contohnya seperti peningkatan pajak daerah dan juga sumber daya alam lainnya. Ini terlihat dari proporsi rata-rata DAU lebih besar dibandingkan dengan PAD yang hanya memberikan kontribusi sebesar 10% terhadap belanja daerah. Hal ini dapat menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tetap ada, karena secara langsung pemberian PAD kepada daerah yang berarti pemerintah pusat mensubsidi pengeluaran daerah untuk mengurangi beban pembiayaan, sehingga akan melemahkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri.

Dengan adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer dimana seharusnya pemerintah pusat membuat kinerja monitoring dan evaluasi pada pemerintah daerah dalam rangka memonitor, mengontrol, dan mengevaluasi penggunaan dana DAU, hal ini diperlukan untuk mencegah respon yang berlebihan dan menyikapi penerimaan DAU di daerah. Mengakibatkan kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Akibat *flypaper effect* yang paling penting yaitu pemerintah daerah memperlihatkan perilaku yang tidak seperti biasanya, sehingga cenderung melakukan manipulasi pengeluaran setinggi mungkin dengan tidak mengupayakan maksimalisasi PAD. Hal tersebut dilakukan agar nantinya dapat memperoleh bantuan berupa

transfer dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah merasa lebih mudah untuk memaksimalkan belanja daerah daripada menempuh cara untuk memaksimalkan PAD. Seharusnya pemerintah daerah mulai mencari cara serta mengupayakan memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada meningkatnya PAD. Cara ini harus dilakukan karena tidak mungkin selamanya pemerintah daerah akan selalu bergantung pada transfer pemerintah pusat.

2.1.3 Bukti Empiris *Flypaper Effect*

Beberapa penelitian di Amerika membuktikan adanya fenomena *flypaper effect*. Gramlich (1987) melakukan studi yang kemudian menemukan bahwa *flypaper effect* terjadi di Negara bagian dan municipal di AS antara tahun 1980-1996. Deller et al (2007) juga menguji hubungan belanja dan dana transfer di 581 desa, kota dan Negara bagian Wisconsin. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah daerah yang menerima dana transfer, menghabiskan dana tersebut lebih dari prediksi oleh pemilih nilai tengah. Dengan demikian peneliti menyimpulkan teori ekonomi murni memiliki keterbatasan dalam belanja pemerintah dan karenanya faktor politik dan institusi sangat dibutuhkan dalam pertimbangan pemberian dana alokasi umum.

Deller dan Maher (2005) melakukan studi di Wisconsin yang menyatakan bahwa *grants* tidak diberi syarat municipal membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan yang tidak penting lebih kepada barang-barang mewah seperti taman dan rekreasi, kebudayaan dan pelayanan pendidikan daripada kebutuhan umumnya seperti keamanan dan pemadam kebakaran.

Di Inggris juga menghadapi fenomena yang sama. Norman et al (2002) menemukan kesimpulan bahwa di Municipal Inggris terdapat bukti kuat dan Wales melakukan ilusi *grants* atau yang sering disebut *flypaper effect*, dengan bukti terdapat minimnya akuntabilitas atas penerimaan dari pajak property dan ilusi penyewa. Municipal melakukan penyesuaian pada pajak property guna menutupi kekurangan dana dan membiayai belanja karena minimnya *grants*.

Gorodnichenko (2011) berpendapat bahwa fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi. Pertama yaitu merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan, yang kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya itu sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh sebab itu, setiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin, (Fauzi

dan Iskandar, 1984:44). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Mardiasmo (2002).

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menyatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah yaitu:

1. Pajak Daerah

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 mendefinisikan pajak daerah sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Resmi (2009:9) pajak daerah adalah “pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Menurut UU No.28 tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota yaitu: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea perolehan atas hak tanah bangunan.

Berdasarkan pengertian pajak daerah diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang harus dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan hasilnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Menurut Yani (2008) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Daerah kabupaten/kota diberi peluang untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, berdasarkan criteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Undan-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, objek retribusi adalah “jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu”. Objek retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan pemanfaatan umum dan juga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi perizinan tertentu yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang mencakup pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis pendapatan retribusi yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu meliputi: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak ktp dan cetak akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin

gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan (UU No.28 Tahun 2009).

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya maupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah.

Menurut Halim (2004:68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang mencakup bagian laba perusahaan milik daerah, bagian lembaga keuangan bank, bagian lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/bumd, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/bumn, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mencakup berbagai macam laba.

4. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Menurut Halim (2004:69), jenis pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah yaitu mencakup hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan daerah.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah adalah jenis lain-lain PAD yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan lain antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah merupakan pendapatan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah dan dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang

wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternative untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman ke pemerintah pusat, pinjaman ke pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga menerbitkan obligasi daerah.

5. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Daerah

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang asli.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya. Hasil penelitian yang dilakukan Roekaerts dan Savat (Spillane, 1987:138) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata yaitu: menambah pemasukan

dan pendapatan baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, restoran, dan rumah makan. Pramuwisata, biro perjalanan dari penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan, membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut, menambah devisa Negara, semakin banyaknya wisatawan yang datang, maka banyak devisa yang akan diperoleh, merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah.

2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang kemudian tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan, tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan, memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

2.3.1 Klasifikasi Belanja Daerah

1. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Terdiri Dari Belanja Urusan Wajib Dan Belanja Urusan Pilihan

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) belanja urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertahanan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi informatika.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

2. Belanja Menurut Fungsi

Belanja menurut fungsi yaitu digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara mencakup pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan juga perlindungan sosial.

3. Belanja Menurut Organisasi

Belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah

4. Belanja Menurut Program Dan Kegiatan

Belanja menurut fungsi program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Belanja Menurut Kelompok

Belanja menurut kelompok mencakup belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan secara langsung dengan program sedangkan belanja tidak langsung tidak terkait langsung dengan program seperti belanja pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

2.3.2 Jenis-Jenis Belanja Daerah

Secara umum belanja daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi lima yaitu:

1. Belanja Administrasi Umum

Belanja administrasi umum yaitu semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum mencakup belanja pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja barang dan belanja pemeliharaan.

Belanja pegawai adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk orang yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. Belanja perjalanan dinas adalah pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan dewan dan pegawai yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja barang adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

Belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

2. Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi: belanja pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.

Belanja barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan dapat menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal mencakup belanja publik dan belanja aparatur.

Belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum secara langsung. Contohnya yaitu, pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa dan pembelian mobil ambulans. Belanja aparatur

yaitu belanja yang manfaatnya dinikmati oleh masyarakat secara tidak langsung akan namun dapat dirasakan oleh aparaturnya secara langsung. Contohnya, pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa berharap adanya pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini mencakup pembayaran atas angsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan.

5. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

2.3.3 Belanja Daerah Menurut Fungsi

1. Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan

Berdasarkan Pasal 49 bahwa alokasi anggaran adalah alokasi pada sektor pendidikan. Dalam istilah penganggaran, sektor sepadan dengan fungsi, hal ini diatur dalam peraturan menteri keuangan No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Klasifikasi anggaran menurut fungsi, merinci anggaran belanja menurut fungsi dan sub fungsi. Fungsi itu sendiri memiliki pengertian perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke

daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total alokasi anggaran belanja negara.

2. Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan kesehatan di Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan juga dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat, swasta maupun pemerintah. Pembangunan kesehatan pada tahun 2014 adalah pembangunan kesehatan berkelanjutan yang hasilnya sudah mulai menunjukkan kecenderungan membaik dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya.

3. Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu peraturan mengenai keuangan Negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 23 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Selain berpedoman terhadap teori-teori yang diperoleh pada literature-literatur yang dijadikan acuan penelitian ini namun juga melihat pada beberapa hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Inayanti (2017)	Fenomena <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Daerah Di Indonesia	Dependen: Belanja Daerah Independen: <i>Flypaper Effect</i>	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja daerah
2	Fitrii Amalia (2017)	<i>Flypaper Effect Of Regional Expenditures And It's Impact To Regional</i>	Dependen: Belanja Daerah Independen: <i>Flypaper Effect</i>	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah dan kesenjangan daerah antara kedua kawasan.

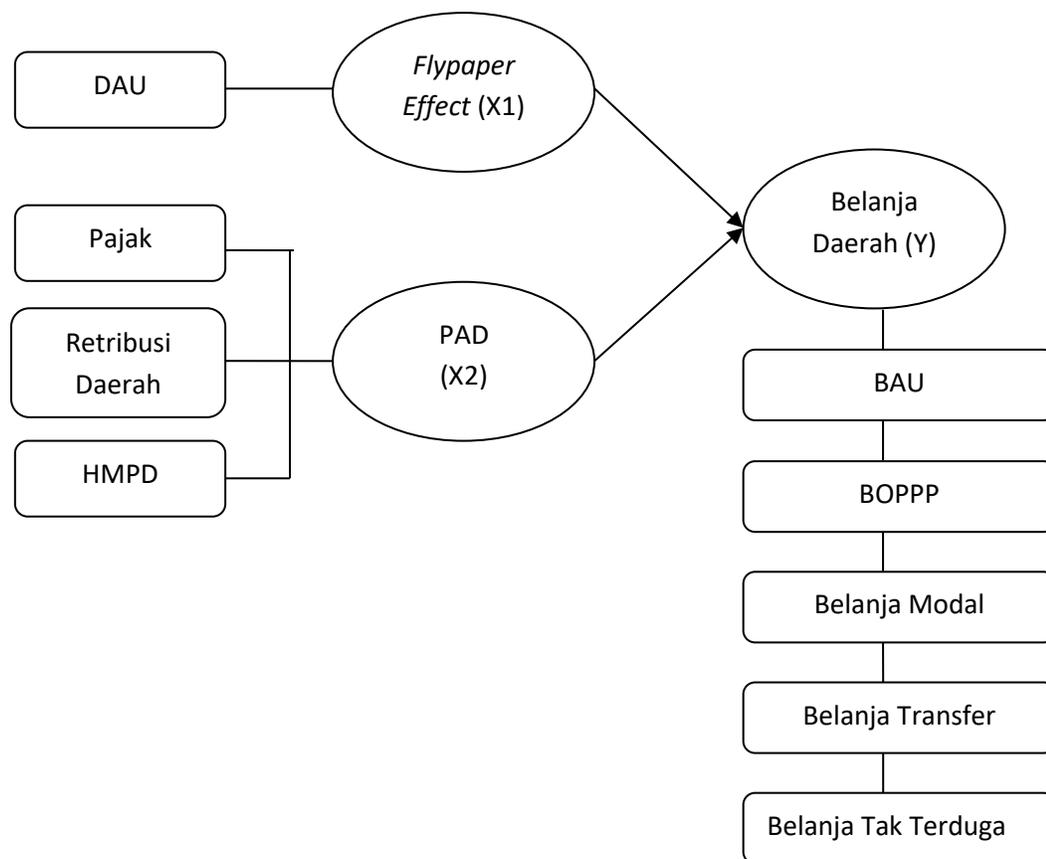
		<i>Inequality In Indonesia</i>		Selain itu telah terjadi <i>flypaper effect</i> belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia
3	Widi Angga Kurniawan (2016)	<i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah	Dependen: Belanja Daerah Independen: a. <i>Flypaper effect</i> b. DAU c. PAD	Dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Variabel dana alokasi umum lebih berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah membuktikan adanya <i>flypaper effect</i> dalam respon pemerintah daerah terhadap DAU dan PAD. <i>Flypaper effect</i> sama-sama terjadi pada daerah yang memiliki PAD rendah dan dengan PAD yang tinggi
4	Nur Alam <i>et al</i> (2016)	<i>Flypaper Effect</i> Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi	Dependen: Belanja Modal Independen: a. <i>Flypaper Effect</i> b. Kinerja Keuangan	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Tidak terjadi <i>flypaper effect</i> pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal. Kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja dan alokasi belanja modal berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
5	Bambang Agus Pramuka (2010)	<i>Flypaper Effect</i> Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa	Dependen: Belanja Daerah Independen: <i>Flypaper Effect</i>	DAU dan PAD secara signifikan mempengaruhi operasi, modal, dan total pengeluaran pemerintah daerah, untuk tahun yang

				bersangkutan dan tahun berikutnya
6	Fitri Amalia (2015)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Banten	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: <i>Flypaper Effect</i>	PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan tidak terjadi <i>flypaper effect</i> pada kabupaten/kota di provinsi Banten
7	Haryo Kuncoro (2007)	Fenomena <i>Flypaper Effect</i> Pada Kinerja Keuangan Pemeirintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: <i>Flypaper Effect</i>	Peningkatan alokasi transfer pemerintah pusat, dan pertumbuhan belanja pemerintah daerah diikuti dengan penggalian PAD yang lebih tinggi. Gejala ini memperhatikan bahwa birokratn pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat
8	Kusumadewi, Rahman (2007)	<i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia	Dependen: Belanja Daerah Independen: a. <i>Flypaper effect</i> b. DAU c. PAD	PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah masing-masing variabel independen yaitu PAD dan DAU, signifikan terhadap belanja daerah. Pengaruh DAUt-1 terhadap belanja daerah tahun berjalan lebih kuat daripada pengaruh PADt-1 terhadap belanja daerah <i>flypaper effect</i> tidak hanya terjadi pada daerah dengan PAD rendah namun juga pada daerah dengan PAD tinggi
9	Yohanis Tuaputimain (2019)	<i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah	Dependen: Belanja Daerah Independen: a. <i>Flypaper Effect</i> b. DAU c. PAD	Realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah, pendapatan asli pemerintah di daerah secara rata-rata lebih kecil dari dana alokasi umum terhadap belanja daerah, sehingga terjadi <i>flypaper effect</i> pada keuangan daerah
10	Muhammad Armawaddin	Analisis <i>Flypaper Effect</i>	Dependen: Belanja Daerah	Terdeteksi adanya <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah

	(2015)	Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tenggara	Independen: <i>Flypaper Effect</i>	kabupaten/kota Sulawesi Tenggara
11	Ade Irma Suryani (2018)	<i>Flypaper Effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Dan Jawa Barat	Dependen: Belanja Daerah Independen: a. PAD b. DAU	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan terjadi <i>flypaper effect</i> pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi jawa timur, jawa tengah dan jawa barat
12	Riki Hasan Al Khoiri (2015)	<i>Flypaper Effect</i> Dan Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Barat	Dependen: Belanja Daerah Independen: <i>Flypaper Effect</i>	Tidak terjadi <i>flypaper effect</i> dimana sumber penerimaan berasal dari PAD yang lebih besar mempengaruhi besaran belanja ditahun berikutnya
13	Pradipto Jatmiko (2018)	Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> , Pendapatan Asli Daerah Dan Produk <i>Domestic Regional Bruto</i> Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Di Indonesia	Dependen: Belanja Daerah Independen: a. PAD b. DAK	DAK, DBH, PAD berpengaruh positif terhadap pengeluaran daerah. DAU dan PDRB tidak berpengaruh terhadap pengeluaran local
14	Nailufar, Sufitrayati (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Di Kota Banda Aceh	Dependen: Belanja Daerah Independen: a. PAD b. DAK	PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah

15	Masdjojo, Sukartono (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah	Dependen: Belanja Daerah Independen: a. PAD b. DAU c. DAK d. DBH	PAD,DAU,DAK dan DBH secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah di 14 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur.
----	----------------------------	--	---	--

2.5 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis Penelitian

Dari kerangka konseptual diatas salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan suatu daerah maka semakin besar juga suatu daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Disamping itu, sumber penerimaan suatu daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan dana yang dialokasikan kepada setiap daerah tiap tahunnya yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka hipotesis yang merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Diduga terdapat pengaruh signifikan *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah

H2 : Diduga terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Menurut Sugiono (2002) penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian asosiatif ini digunakan untuk menemukan adanya *flypaper effect* dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang dilakukan secara empiris pada pemerintah kota Palopo.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi obyek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (Sugiono,2011). Ditarik kesimpulan populasi pada penelitian ini adalah laporan realisasi APBD kota Palopo.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Sugiono,(2011). Dalam penelitian ini, sampelnya adalah laporan realisasi APBD 2010-2019.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat *time series*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda (*multiple linear*

regression). Dengan melihat pengaruh yang terjadi dari variabel bebas terhadap variabel terikat yang bertujuan untuk mengetahui apakah *flypaper effect* dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20.

3.3.2 Sumber Data

Data diperoleh dari dokumen laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Palopo, yaitu dari data dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD) dan data belanja daerah tahun 2010-2019 yang bersumber dari kantor BPKAD dan juga dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo (<https://palopokota.bps.go.id>) pada publikasi Palopo Dalam Angka. Untuk melihat apakah terjadi *flypaper effect* dalam penelitian ini maka mengambil data dana alokasi umum sebagai dana transfer.

3.4 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Variabel penelitian dan definisi operasional memberikan pengertian terhadap konstruk atau memberikan dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan peneliti untuk mengukur. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini dilakukannya pengujian hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam penelitian ini meneliti hubungan antara *flypaper effect*, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang dikategorikan sebagai variabel dependen.

1. Variabel Independen

Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah *flypaper effect* dan pendapatan asli daerah (PAD).

a. *Flypaper Effect*

Flypaper effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/*grants* atau spesifiknya transfer tidak bersyarat atau *unconditional grants* daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah. Untuk menguji apakah terjadi *flypaper effect* pada kota Palopo maka peneliti mengambil data pada dana alokasi umum sebagai dana transfer.

b. Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah merupakan variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (BD). Yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah pada penelitian ini yaitu angka realisasi pendapatan asli daerah kota Palopo pada tahun anggaran 2010-2019 dengan nominal mata uang Rupah (Rp).

2. Variabel Dependen

Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Yang dimaksud dengan belanja daerah dalam penelitian ini adalah angka realisasi belanja

daerah pemerintah kota Palopo pada tahun anggaran 2010-2019 dengan nominal mata uang Rupiah (Rp).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang tidak langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertamanya yang sudah ada tersedia sebelum melakukan penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu dengan melakukan pengambilan data pada kantor BPKAD kota Palopo. Tahap kedua adalah studi dokumentasi, dengan mengumpulkan data berupa laporan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian melalui media internet dengan cara *men-download* laporan (APBD) yang dibutuhkan.

3.6 Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi program SPSS Versi 20 sebagai alat untuk menguji data tersebut dan kemudian dianalisis dengan analisis sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis mengolah data-data yang tersedia sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah. Tujuan dari penyajian statistik deskriptif ini untuk melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan

dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja daerah.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah lolos dari asumsi klasik atau model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus mendistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas dan heteroskedastisitas. Maka dari itu sebelum melakukan pengujian linear berganda sebaiknya dilakukan lebih dahulu pengujian klasik (Ghozali,2006), yang terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Tujuan pengujian normalitas yaitu untuk menguji apakah didalam model regresi, variabel pengganggu atau variabel residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0.05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0.05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* <0.10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2006).

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Deteksi gejala heteroskedastisitas digunakan uji park, yaitu dengan menguji tingkat signifikansi.

Pengujian ini dilakukan dengan merespon variabel (x) sebagai variabel independen dengan nilai absolute *unstandardized* residual regresi sebagai variabel dependen. Apabila hasil uji diatas level signifikan ($p > 0,05$), berarti tidak terdapat heteroskedastisitas, apabila dibawah level signifikan ($p < 0,05$).

3.6.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan menjadi tidak layak untuk dipakai (Singgih Santoso, 2000).

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bias menggunakan Uji *Durbin Watson* (DW test).

Tabel 3.1
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dl = d = du$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada	No Decision	$4 - du = d = 4$

autokorelasi negative		-dl
Tidak ada autokorelasi positif dan negative	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali, 2006

3.6.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji Regresi Linear Berganda

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linear yang digunakan untuk melihat hubungan pendapatan asli daerah dalam mempengaruhi belanja daerah. Data ini diolah dengan menggunakan *software* SPSS. Untuk melihat pengaruh jumlah pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah maka menggunakan analisis regresi sederhana secara *time series* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Belanja daerah

X₁ : Flypaper Effect

X₂ : Pendapatan Asli Daerah

β : koefisien regresi

X : PAD

ε : *Error term*

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Semakin tinggi koefisien determinasi, maka semakin tinggi kemampuan variabel independen menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen, jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

3. Uji t

Uji t dilakukan dengan membandingkan *P Value* t hitung yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen dalam persamaan regresi diatas dengan derajat signifikannya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas yaitu jika *P Value* t hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak. Untuk mengetahui adanya *flypaper effect* maka *P Value* t hitung DAU harus lebih signifikan (lebih kecil) daripada *P Value* t hitung PAD, atau *P Value* t hitung PAD tidak signifikan.

4. Uji F

Uji F dilakukan dengan membandingkan *P Value* f hitung yang dihasilkan dari model regresi tersebut dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa diatas adalah jika *P Value* f hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak dengan makna bahwa variabel PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat BPKAD Kota Palopo

Pada awal dibentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan peraturan daerah kota Palopo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Setelah adanya peraturan daerah kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berubah Menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

4.1.2 Tugas Dan Fungsi BPKAD Kota Palopo

Secara umum kepala badan mempunyai tugas dan pokok membantu walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. sedangkan berdasarkan fungsinya badan pengelolaan keuangan dan aset daerah menyelenggarakan:

- 1 Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah,

- 2 Pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD),
- 3 Penyelenggaraan Kegiatan Teknik Operasional Dan Fungsional Dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah,
- 4 Pengoordinasian Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah,
- 5 Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah,
- 6 Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan walikota palopo nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota Palopo, maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga berperan sebagai pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus bendahara umum daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1.3 Visi dan misi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)

1. Visi

“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga, dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya, dan Lingkungan Yang Terkemuka di Indonesia”.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) aparat pelaksana pengelola keuangan dan aset daerah,
- b. Meningkatkan kualitas system pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah,
- c. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

4.2 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi pada penelitian ini yaitu Laporan Realisasi APBD pemerintah kota Palopo dan diperoleh sampel yaitu Laporan Realisasi APBD (DAU, PAD, dan Belanja Daerah) pemerintah kota Palopo selama 10 tahun (2010-2019). Laporan Realisasi APBD bersumber langsung dari kantor BPKAD kota Palopo dan juga dari badan pusat statistic kota palopo (<https://palopokota.bps.go.id>) pada publikasi dalam angka.

Tabel 4.1
Sampel penelitian

Tahun	Belanja Daerah	DAU	PAD
2010	38,366,358,612.000.00	27,858,748,660.000.00	28,219,019,91.000.00
2011	498,403,458,036.54	297,920,487,000.00	3,570,342,151,600.00
2012	525,772,059,998.00	361,383,685,000.00	3,621,400,233,030.00
2013	58,136,854,968,100.00	408,527,791,000.00	5,166,372,916,220.00
2014	64,846,372,268,849.00	449,242,430,000.00	8,164,667,613,553.00
2015	76,197,408,071,731.00	476,408,524,000.00	9,227,778,380,500.00
2016	104,504,474,074,520.00	525,397,125,000.00	13,411,007,622,035.00
2017	96,385,511,282,104.00	516,167,587,000.00	16,730,713,160,915.00
2018	98,292,262,736,589.00	516,167,587,000.00	13,928,284,648,407.00
2019	95,645,185,703,035.00	537,722,702,000.00	16,566,435,478,008.00

Sumber: data sekunder diolah 2020

4.2.1 Uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum Sugiono (2012).

Analisis statistik deskripsi ini meliputi standar deviasi, *mean*, nilai maksimum, nilai minimum dan jumlah peelitian sehingga penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Dari hasil pengumpulan data sekunder tentang Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli daerah, dan Belanja Daerah pemerintah kota Palopo tahun 2010-2019 maka statistik deskriptif yaitu *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X.1	10	27,858,748,66 0.00	537,722,702,000 .00	411,679,666,666. 00	156,010,687,806 .20
X.2	10	282,901,991.0 0	16,730,713,160, 915.00	9,038,728,510,62 5.90	5,921,679,924,1 18.04
Y	10	38,366,358,61 2.00	104,504,474,074 ,520.00	59,507,061,098,1 57.50	43,463,057,565, 475.20
Valid N (listw ise)	10				

Sumber: data sekunder diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sampel berjumlah 10 (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Belanja Daerah sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 38,366,358,612,00 dengan nilai maksimum sebesar

104,504,474,074,520.00, sedangkan nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 59,507,061,098,157.50 dengan standar deviasi sebesar 43,463,057,565,475.20. standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean*, hal ini berarti bahwa simpangan data pada variabel belanja daerah tidak terlalu besar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa deviasi antara nilai minimum dan nilai maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat dikatakan baik karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai minimum dan maksimum Belanja Daerah.

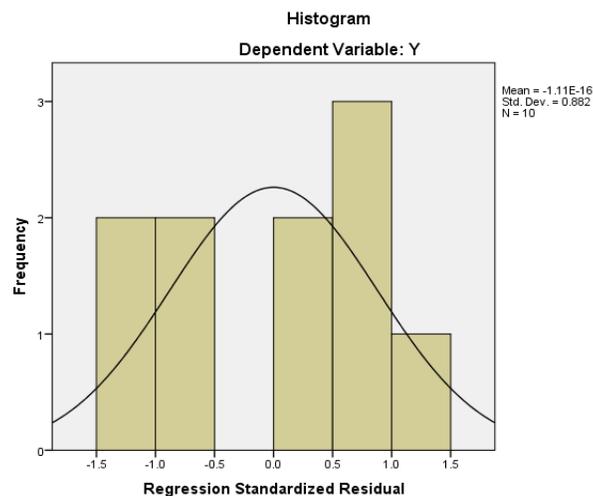
Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar 27,858,748,660.00 dengan nilai maksimum sebesar 537,722,702,000.00, sdangkan nilai *mean* sebesar 411,679,666,666.00 dengan standar deviasi sebesar 156,010,687,806.20. standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil daripada nilai *mean*, hal ini berarti bahwa simpangan pada data tidak terlalu besar dari Dana Alokasi Umum terendah dan tertinggi.

Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 282,901,991.00 dengan nilai maksimum sebesar 16,730,713,160,915.00, sedangkan nilai *mean* sebesar 9,038,728,510,625.90 dengan standar deviasi sebesar 5,921,679,924,118,04. Standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil daripada *mean*, dalam hal ini simpangan pada data tidak terlalu besar dari Pendapatan Asli Daerah terendah dan tertinggi.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui penyebaran data yang dianalisis. Uji normalitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual harus normal karena jika nilai residual tersebut tidak normal, maka uji statistic akan menjadi tidak valid. Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Berikut ini uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik.

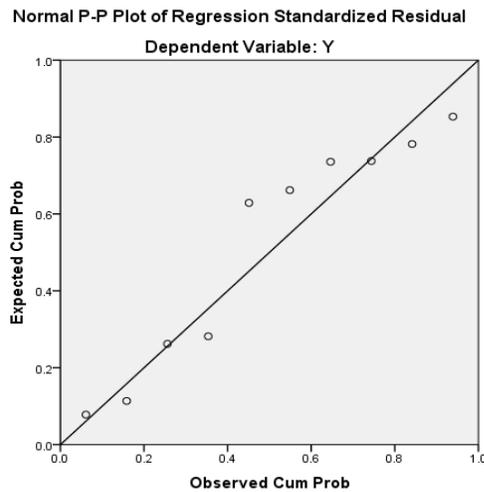


Gambar 4.1 Grafik Histogram Uji Normalitas

Sumber: data sekunder diolah 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa distribusi penyebaran residual yang normal, karena grafik tersebut tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun ke kiri. Meskipun dalam grafik tersebut terdapat beberapa residual yang melenceng dari garis, akan tetapi jumlah tersebut dimaklumi karena hanya sedikit.

Selain dari grafik di atas, uji normalitas data ini dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal plot dibawah ini:



Gambar 4.2 Grafik P-Plot Uji Normalitas

Sumber: data sekunder diolah 2020

Dalam grafik normal P-Plot di atas dapat diketahui bahwa data residual dalam penelitian ini normal. Hal tersebut terjadi karena apabila residual berasal dari distribusi yang normal, maka nilai sebaran terletak disekitar garis lurus. Pada gambar grafik di atas juga terlihat bahwa sebaran residual yang dilambangkan dengan titik atau lingkaran kecil tersebar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya sehingga normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukannya uji *multikolinearitas* adalah untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak terjadi korelasi di antara

variabel independennya. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil uji *multikolinearitas* dalam penelitian ini:

Tabel 4.3 Uji *Multikolinearitas*

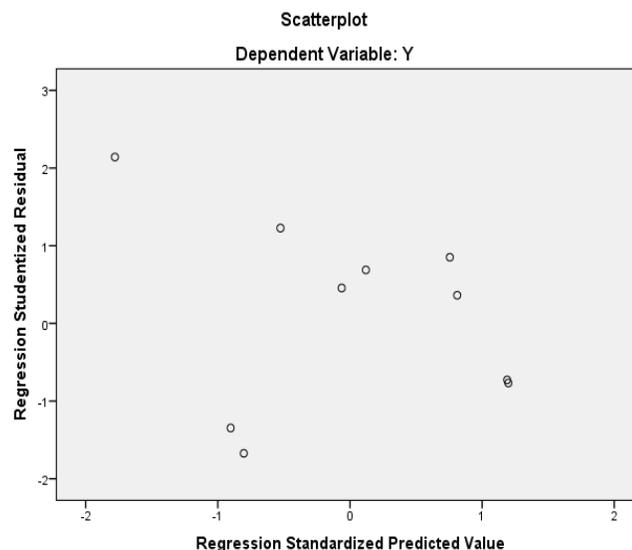
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
DAU	0.268	3.738
PAD	0.268	3.738

Berdasarkan hasil dari uji *multikolinearitas* di atas dapat dilihat dan diketahui bahwa nilai *tolerance* yang dapat diperoleh dari masing-masing variabel adalah > 0,100. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut yaitu, variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,286 dan variabel Pendapatan Asli daerah sebesar 0,286. Sehingga nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus > 0,100.

Sedangkan nilai *Varians Inflation factor* (VIF) dalam penelitian ini yaitu sebesar 3,738 untuk Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,738. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji *multikolinearitas* ini bahwa nilai dari VIF harus < 10,000. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala *multikolinearitas* antar variabel independen di dalam penelitian ini.

4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji *heterokedastisitas* adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah didalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut sebagai *homoskedastisitas*. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang *homoskedastisitas* atau tidak *heteroskedastisitas*. Berikut hasil pelaksanaan uji *heteroskedastisitas*:



Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Gambar di atas yaitu gambar yang diperoleh dari hasil uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dari hasil pengujian grafik tersebut dapat dilihat titik-titik atau lingkaran kecil menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi

heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan.

Selain menggunakan grafik *scatterplot* di atas, dalam menentukan *heteroskedastisitas* ini juga menggunakan uji *glejser*. Dalam melaksanakan uji *glejser* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Uji Glejser

Model	t	sig.
(constant)	2.322	.053
X.1	1.255	.250
X.2	-2.05	.080

Pada tabel di atas uji *glejser*, nilai signifikan yang diperoleh dari uji tersebut untuk variabel Dana Alokasi Umum yaitu sebesar 0,250 dan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 0,080. Nilai-nilai yang diperoleh oleh seluruh variabel telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikan dalam uji ini harus diatas 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala *heteroskedastisitas*.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.942

Terjadinya *autokorelasi* dapat dideteksi menggunakan uji *Durbin-Watson* (D-W test). Jika nilai D-W lebih kecil dari -2 atau lebih besar dari +2, maka terjadinya indikasi

autokorelasi. Atau jika nilai D-W berada diantara -2 dan +2, menunjukkan tidak terjadinya *autokorelasi* (Rimbawan, 2011:268).

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh nilai DW sebesar 1,942, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai pada tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 10 (n) dan jumlah variabel independen 2 (K=2). Nilai DW 1,942 lebih besar dari batas (du) 1,64, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah *autokorelasi*.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.5 Uji Regresi Linear Berganda

Tujuan analisis regresi linear berganda pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kota Palopo. Hasil yang diperoleh dari proses perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	-1.357	1.972
X.1	58.710	77.8
X.2	5.411	2.050

Dari hasil perhitungan regresi linear berganda tersebut dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen diungkapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = -1,357 + 58,710 + 5,411$$

- a. Nilai konstanta sebesar -1,357 artinya jika X_1 dan X_2 nilainya adalah 0, maka Y nilainya adalah -1,357
- b. Koefisien regresi X_1 sebesar 58,710, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan X_1 mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 58,710. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara X_1 dengan Y , semakin naik X_1 maka semakin meningkat Y .
- c. Koefisien regresi dari X_2 sebesar 5,411, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan X_2 mengalami kenaikan 1%, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 5,411. Koefisien bernilai positif yang berarti terjadi hubungan positif antara X_2 dengan Y , semakin meningkat X_2 maka Y semakin naik.

1. Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. Berikut hasil olah data untuk koefisien determinasi:

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi R²**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.924 ^a	.854	.812	1.883

a. Predictors: (Constant), X.2, X.1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: data sekunder diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,854 atau 85%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah adalah sebesar 85% sedangkan sisanya 15% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (0,05). Jika nilai probabilitas signifikan < 0,05, maka berarti suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependennya. Variabel independen meliputi Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. variabel dependennya yaitu Belanja Daerah. berikut ini adalah hasil uji t:

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Model	t	Sig.
constant	-.688	.513
X.1	.755	.475
X.2	2.640	.033

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari dua variabel independen yang dimasukkan kedalam model, terdapat satu variabel independen (PAD) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Daerah). variabel tersebut menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,640 > 1,81246$) atau $sig < \alpha$ ($0,33 < 0,05$)

Berdasarkan tabel 4.8, dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:
 Ha : Diduga terdapat pengaruh *Flypaper Effect* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pemerintah kota Palopo.

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikan untuk Dana Alokasi Umum sebesar 0,475, nilai ini lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 ($0,475 > 0,05$) dan diperoleh t_{hitung} sebesar 0,755 lebih kecil dari t_{tabel} ($0,755 < 1,81246$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (variabel Independen) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan namun berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (variabel dependen).

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,033, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 ($0,033 < 0,05$) dan diperoleh t_{hitung} sebesar 2,640 lebih besar dari t_{tabel}

1,81246 ($2,640 > 1,81246$) sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (variabel independen) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah (variabel dependen).

3. Hasil Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil pengujian F dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Statistik F

F	sig.
20.463	001 ^b

Sumber: data sekunder diolah 2020 (dalam milyar rupiah)

Berdasarkan tabel 4.9 terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari α (0,05). Hal ini berarti bahwa semua variabel independen (DAU dan PAD) berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Belanja Daerah.

4.3 Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh *Flypaper Effect* Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara signifikan namun berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berdasarkan dari hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar $0.475 > 0,05$, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel

Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah kota Palopo. Tidak berpengaruh secara signifikan berarti bahwa Dana Alokasi Umum tidak memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Belanja Daerah pemerintah kota Palopo. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,005$

Dana Alokasi Umum merupakan (DAU) dana yang dialokasikan kepada suatu daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, alokasi DAU ditetapkan minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Neto. Sampai dengan tahun 2014 alokasi DAU ditetapkan sebesar 26% dari PDN Neto, kemudian pada tahun 2015 dan tahun 2016 alokasi DAU yang ditetapkan menjadi 27,7% dari PDN Neto, terakhir tahun 2017 dan tahun 2018 alokasi DAU yang ditetapkan menjadi sebesar 28,7% dari PDN Neto. Teori tentang *Flypaper Effect* menyatakan bahwa *Flypaper Effect* adalah suatu kondisi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/*grants* atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat daripada Pendapatan Asli Daerahnya tersebut sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah.

Teori *Fiskal Illusion* yang digunakan pada beberapa penelitian tentang sumber munculnya *Flypaper Effect* mengemukakan bahwa *Flypaper effect* terjadi

dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan serta keputusan yang diambil akibat dari kesalahan tersebut. *Flypaper Effect* disebabkan karena adanya penyimpangan dalam teori bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa transfer pemerintah pusat memang meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi ternyata tidak substitut bagi PAD daerah maka dapat dikatakan terjadinya *Flypaper Effect*. Diah dan Arif menyatakan bahwa ketika respon pemerintah daerah lebih besar untuk transfer dibandingkan pendapatan daerah sendiri maka disebut *Flypaper Effect*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Haryo Kuncoro (2007) yang menghasilkan bahwa peningkatan alokasi transfer pemerintah pusat, dan pertumbuhan belanja pemerintah daerah diikuti dengan penggalan PAD yang lebih tinggi. Gejala ini memperhatikan bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat, sehingga tidak terjadinya *flypaper effect*. Penelitian Riki Hasan Al Khoiri (2015) menemukan bahwa sumber penerimaan berasal dari PADlah yang lebih besar mempengaruhi besaran belanja daerah dibandingkan dengan dana transfer sehingga tidak terjadi *flypaper effect* terhadap belanja daerah. Fitri Amalia (2015) menemukan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan tidak terjadinya *flypaper effect* pada kabupaten/kota di provinsi Banten. Nur Alam *et al* (2016) juga menemukan bahwa tidak terjadinya *flypaper effect* karena pendapatan asli daerah lebih berpengaruh positif dan signifikan dibandingkan dengan dana alokasi umum .

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Armawaddin (2015) menyimpulkan bahwa pada kabupaten/kota Sulawesi Tenggara terdeteksi adanya adanya *Flypaper Effect*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2010-2013 terdeteksi terjadinya *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota Sulawesi Tenggara yang mengindikasikan bahwa dalam masa pengamatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara terjadi inefisiensi penggunaan dana Belanja Daerah. Yohanis Tuaputimain (2019) yang menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli pemerintah di daerah secara rata-rata lebih kecil dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah, sehingga terjadi *Flypaper effect*.

Secara parsial DAU berpengaruh positif namun tidak signifikan dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, secara simultan keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah pemerintah kota Palopo. Dengan demikian berarti bahwa *Flypaper Effect* tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pemerintah kota Palopo, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah pemerintah kota Palopo. Hal ini berarti bahwa H_1 Ditolak.

4.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dalam daerahnya sendiri. Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pendapatan Asli Daerah adalah tulang punggung dari pembiayaan daerah, sehingga kemampuan melaksanakan ekonomi dapat diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan PAD terhadap Belanja Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Langkah terpenting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang riil yang dimiliki oleh daerah. maka dari itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah memiliki tingkat signifikan $0,033 < 0,05$, hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah kota Palopo. Memiliki pengaruh yang signifikan berarti bahwa Pendapatan Asli daerah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Belanja Daerah pemerintah kota Palopo. Pengujian secara simultan juga menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah pemerintah di 14 kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun yang sama Inayanti melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan nilai koefisien DAU lebih

besar dibandingkan dengan PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di Indonesia lebih bergantung terhadap DAU dibandingkan PAD. Bambang Agus Pramuka (2010) menunjukkan hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah secara signifikan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dan simultan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pemerintah kota Palopo. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa H₂ Diterima.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *flypaper effect* merupakan suatu fenomena saat pemerintah daerah dalam hal membiayai belanjanya lebih banyak bersumber dari dana transfer dibandingkan dari pendapatannya sendiri. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa DAU dan PAD secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun dilihat secara parsial DAU memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan sedangkan PAD memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan. Sehingga berarti bahwa Pendapatan Asli daerah lebih berpengaruh dalam hal Belanja Daerah pemerintah kota Palopo daripada dana transfer (DAU). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah pemerintah kota Palopo pada tahun 2010-2019. Hal ini berarti bahwa pemerintah kota Palopo telah cukup baik dalam hal mengelola keuangan daerah sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer yang menciptakan suatu kemandirian keuangan daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penyusunan penelitian ini telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang masih perlu dikembangkan diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen.
2. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap satu daerah di provinsi Sulawesi selatan yaitu kota Palopo.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka beberapa saran dari peneliti yang ingin dikemukakan yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah, lebih meningkatkan lagi Pendapatan Asli Daerah agar kemandirian keuangan daerah kota Palopo tetap terjaga dan ketergantungan terhadap dana transfer tidak terjadi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menambahkan variabel lain dan dapat melakukan penelitian di beberapa daerah lagi.

DAFTAR RUJUKAN

- Amril, Erfit Dan Safri. 2015. “*Flypaper Effect* Pada Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi”. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah.
- Christopher, Russell Olukayade et al. (2009). Determinants of Equity Price in the Stock Markets. International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 30 (2009). Eurojournal Publishing, Inc.
- Coibion, Olivier, And Yuriy Gorodnichenko. 2011. “*Monetary Policy, Trend Inflation, And The Great Moderation: An Alternative Interpretation.*” *Amerian Economic Review*, 101 (1): 341-70
- Deller, C. Steven and Craig, S. Maher. 2005. Categorical Municipal Expenditures with a Focus on the Flypaper Effect. *Public Budgeting & Finance*, Vol. 5, No.3, page 73-90.
- Diah dan Arief. 2007. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *JAAI*, Juni 2007, Vol.II, No.1, pp. 67-80.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gramlich, E.M. 1987. Intergovernmental Grants: A Review of the Empirical Literature, dalam W.E. Oates, (Ed.), *The Politic Economy of Fiscal Federalism*, Lexington Books, Lexington MA: 219-40.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3 Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik :Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- Halim. Abdul. Akuntansi Sektor Publik “Akuntansi Keuangan Daerah”.edisi Revisi Salemba Empat. Jakarta. 2004.

Haryo, Kuncoro. 2007. "Fenomena *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia". Symposium Nasional Akuntansi X. Makassar.

<https://palopokota.bps.go.id>

Kainde, Christian. (2013). Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 3 : 393-400.

Kusumadewi dan Rahman. 2007. "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia". Jurnal Akuntansi dan *Auditing* Indonesia Vol 11 No. 1, Juni 2007, 67-80.

Mardiasmo, (2000), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen keuangan daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Mutiara Maimunah. 2006. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum(DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera, Simposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006.

Norman, Gemmel et al. 2002. Fiscal Illusion and Political Accountability: Theory and Evidence form Two Local Tax Regimes in Britain. *Public Choice*, Vol.110, page 199-224.

Pambudi, Tri Widodo. 2007. "*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori Dan Kasus. Edisi Kelima. Salemba Empat. Jakarta.

Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.

Singgih Santosa. 2000. Latihan SPSS Statistik Parmetik. Gramedia, Jakarta.

Spillane J.J, 1987. pariwisata Indonesia sejarah dan prospeknya Yogyakarta.

- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2011. Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
- Sukriy, Abdullah & Abdul Halim. 2003. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintahan Daerah: Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawadan Bali, SNAVI, Surabaya 16-17 Oktober 2003.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.